



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat Ke- | : 14 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 8 Juni 2021 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : - Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021; dan - Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. |
| Ketua Rapat | : Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH./Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 34 (tiga puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI D. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI E. Ketua Ombudsman RI F. Kepala Arsip Nasional RI G. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Ombudsman RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan

Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, hari Selasa, 8 Juni 2021, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Ombudsman RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Menteri PAN&RB RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp295.349.382.000,-** (*dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar **Rp57.923.695.000,-** (*lima puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Dan usulan tambahan anggaran Tahun 2022 Kementerian PANRB sebesar **Rp213.142.575.000,-** (*dua ratus tiga belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp59.632.305.000,-** (*lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah*).
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar **Rp579.227.786.000,-** (*lima ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Dan usulan tambahan anggaran Tahun 2022 BKN sebesar **Rp58.715.412.000,-** (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah*).
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar **Rp316.901.455.000,-** (*tiga ratus enam belas milyar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Dan usulan

tambahan anggaran Tahun 2022 LAN sebesar **Rp4.909.000.000,-** (*empat milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah*).

4. Kepala Arsip Nasional RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar **Rp268.512.341.000,-** (*dua ratus enam puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*). Dan usulan tambahan anggaran Tahun 2022 ANRI sebesar **Rp34.633.188.000,-** (*tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
5. Ketua Ombudsman RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar **Rp216.196.508.000,-** (*dua ratus enam belas milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah*). Dan usulan tambahan anggaran Tahun 2022 ORI sebesar **Rp44.084.385.000,-** (*empat puluh empat milyar delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
6. Menteri PAN&RB RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 Kementerian PANRB sebesar Rp71.295.324.000,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp214.080.078.000,- atau sebesar 33.30%.
7. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 KASN sebesar Rp19.983.603.793,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp41.883.723.000,- atau sebesar 47.71%.
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 BKN sebesar Rp215.510.005.679,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp598.178.183.000,- atau 36.03%.
9. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 LAN sebesar Rp101.514.077.833,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp314.932.530.000,- atau sebesar 32.23%.
10. Kepala Arsip Nasional RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 ANRI sebesar

Rp63.938.175.692,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar 278.969.315.000,- atau sebesar 22.92%.

11. Ketua Ombudsman RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 ORI sebesar Rp74.344.195.393,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp205.588.994.000,- atau 36.16%.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Ombudsman RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp295.349.382.000,-** (*dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar **Rp57.923.695.000,-** (*lima puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar **Rp579.227.786.000,-** (*lima ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
 - c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar **Rp316.901.455.000,-** (*tiga ratus enam belas milyar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
 - d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar **Rp268.512.341.000,-** (*dua ratus enam puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);
 - e. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar **Rp216.196.508.000,-** (*dua ratus enam belas milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 selanjutnya.

2. Terhadap usulan tambahan anggaran Tahun 2022 yang disampaikan oleh:
 - a. Kementerian PANRB sebesar **Rp213.142.575.000,-** (*dua ratus tiga belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp59.632.305.000,-** (*lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah*);
 - b. BKN sebesar **Rp58.715.412.000,-** (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah*);
 - c. LAN sebesar **Rp4.909.000.000,-** (*empat milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah*);
 - d. ANRI sebesar **Rp34.633.188.000,-** (*tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
 - e. ORI sebesar **Rp44.084.385.000,-** (*empat puluh empat milyar delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.

3. Terhadap usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2022 yang diusulkan Kementerian PANRB dan ANRI, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang.
4. Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei-Juni 2021 sebagai berikut:
 - a. Kementerian PANRB sebesar Rp71.295.324.000,- (*tujuh puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp214.080.078.000,- (*dua ratus empat belas milyar delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah*) atau sebesar 33.30%;
 - b. KASN sebesar Rp19.983.603.793,- (*sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp41.883.723.000,- (*empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) atau sebesar 47.71%;
 - c. BKN sebesar Rp215.510.005.679,- (*dua ratus lima belas milyar lima ratus sepuluh juta lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar

- Rp598.178.183.000,- (*lima ratus sembilan puluh delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) atau 36.03%;
- d. LAN sebesar Rp101.514.077.833,- (*seratus satu milyar lima ratus empat belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp314.932.530.000,- (*tiga ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*) atau sebesar 32.23%;
- e. ANRI sebesar Rp63.938.175.692,- (*enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp278.969.315.000,- (*dua ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*) atau sebesar 22.92%;
- f. ORI sebesar Rp74.344.195.393,- (*tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp205.588.994.000,- (*dua ratus lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) atau 36.16%.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada BKN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Rabu, 9 Juni 2021, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.34 WIB.

Jakarta, 8 Juni 2021
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH. MBA, MH

A-142